

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Zaenal Afifi* , Mulyanto, Dennyca Hendriyanto Nugroho

Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus, Indonesia

*email: zaenal.afifi@umk.ac.id

ABSTRACT

Kata Kunci:
*Competence Of
The Village
Official;
Accountability;
Village Fund
Management*

The village financial fund Principles based on Permendagri No. 20 of 2018 is that Village fund are managed based on transparent, accountable, participatory principles, and are carried out in an orderly and budgetary discipline. The purpose of this study was to analyze the effect of the competence of the village official on the accountability of village fund management. The test method uses the Stuctural Equation Models (SEM) approach, using the alternative Warp PLS method. The results of the study indicate that competence of the village official affects positive and significant to the accountability of village fund management.

ABSTRAK

Azas Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode pengujian dengan menggunakan pendekatan Stuctural Equation Models (SEM), dengan menggunakan metode alternative WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PENDAHULUAN

Permendagri No. 20 Tahun 2018 ini secara tidak langsung juga mewujudkan arahan Presiden Joko Widodo untuk pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa, dan menyajikan laporan keuangan desa yang lebih ringkas dalam satu halaman dengan tanpa menghilangkan makna akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, menjelaskan, lahirnya Permendagri ini merupakan salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan atas polemik dalam pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang semakin berkembang beberapa tahun terakhir ini.

Kudus (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menilai pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus tergolong cukup bagus karena belum ada temuan hingga harus diproses ke ranah hukum. "Karena dana desa sudah berlangsung beberapa tahun, tentunya sudah ada perbaikan. Hingga kini memang belum ada temuan yang mengarah pengelolaan dana desa yang kurang baik," ujar kata Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng Ayub Amali usai Sosialisasi peran, tugas, dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis. Hal tersebut, kata dia, dibuktikan dengan Pemkab Kudus yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena dianggap mampu menyajikan laporan keuangan dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Apabila laporan keuangan desa terjadi permasalahan, maka opini WTP yang selama ini diperoleh Pemkab Kudus akan turun. Dalam melakukan pengawasan laporan keuangan pemerintah desa, BPK memang tidak bisa mengawasi secara menyeluruh karena keterbatasan personel. Terkait dengan laporan keuangan yang disusun dengan baik dan lengkap, kata dia, memang tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keuangan desa.

Akuntabilitas dapat menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya (Hidayah dan Wijayanti, 2017).

Penelitian ini berfokus pada kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian dari Dian Astri Budiana dkk, 2019 menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, selain itu hasil penelitian dari Intan Trirosa Damayanti, 2020 menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa di seluruh Desa se-Kabupaten Kudus. Jumlah seluruh perangkat desa di seluruh Desa se-Kabupaten Kudus sebanyak 492 orang. Melihat jumlah populasi lebih dari 100 orang, maka teknik pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan rumus dari Taro Yamane dan Slovin (1967) dalam Riduwan (2006; 65) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

d^2 : Presesi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

Berdasarkan rumus Slovin tersebut, maka diperoleh jumlah sampel sebesar 83 responden.

Definisi Operasional dan Variabel penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Variabel Independen yaitu kompetensi perangkat desa. Prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa menurut Mardiasmo (2002: 105) adalah asas transparansi atau keterbukaan yang artinya anggota masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Marihot (2002), sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi karena merupakan salah satu faktor penting dalam pemerintahan. Kemampuan seseorang atau individu, organisasi (lembaga) atau sistem untuk menjalankan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Perangkat desa dalam hal ini berperan sebagai sumber daya manusia dalam pengelolaan desa harus mampu memiliki kompetensi yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, memiliki pengalaman di bidang keuangan. Ini diperlukan untuk mengimplementasikan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada laporan keuangan yang telah dibuat dan laporan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pengukuran variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian internal dengan menggunakan skala ordinal dengan Teknik pengukuran 5 (lima) skala likert.

Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner kepada masing-masing perangkat desa, Adapun penentuan responden yang

dipilih adalah dengan menggunakan teknik sampel *Convenience Sampling*. Menurut Uma Sekaran (2006) *Convenience Sampling* adalah kumpulan informasi-informasi dari anggota populasi yang dengan setuju mau memberikan informasi tersebut. Dengan begitu siapa saja yang setuju memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dapat digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini bila responden tersebut cocok sebagai sumber data.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan metode alternative *partial Least Square* (PLS). Software yang digunakan adalah Software WarpPLS 7.0. PLS merupakan pendekatan alternative yang bergeser dari pendekatan SEM yang berbasis *covariance* menjadi berbasis varian (Ghozali dan Latan, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen

Sesuai dengan prosedur pengujian SEM-PLS, maka evaluasi validitas konvergen konstruk menggunakan indikator berupa loading factor dan average variance extract (AVE).

Tabel 1. *Outer/ Measurement Model*

	Composite Realibility	Cronbach alpa	AVE
KPD	0.915	0.881	0.686
APDD	0.954	0.935	0.837

Sumber : data primer diolah, 2021

Hasil outer model dengan program warp PLS pada tabel 1 menunjukkan kriteria validitas konvergen telah terpenuhi yaitu loading lebih besar dari 0,60 dan AVE lebih besar dari 0,40. Selanjutnya untuk menunjukkan kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi ditunjukkan dengan akar kuadrat AVE lebih besar daripada koefisien korelasi antar konstruk pada masingmasing kolom. Demikian juga reliabilitas telah terpenuhi dengan composite reliability dan cronbach alpha lebih besar dari 0,60.

Hasil Korelasi Antar Konstruk

Matriks korelasi pada tabel 2 menunjukkan terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara kompetensi perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, ditunjukkan dengan koefisien korelasi signifikan. Hasil ini menunjukkan indikasi awal dukungan terhadap hipotesis yang mensyaratkan adanya korelasi yang signifikan antara varabel independent dan variable dependen.

Tabel 2. *Corelations among latent variable*

	KPD	APDD
KPD	(0.828)	0.460
APDD	0.460	(0.915)

Sumber : data primer diolah, 2021

Goodness Of Fit

Hasil estimasi model menunjukkan kriteria goodness of fit telah terpenuhi yaitu nilai APC dan ARS signifikan secara statistis dan AFVIF kurang dari 5. Hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa persyaratan untuk pengujian model telah terpenuhi dan tidak terjadi multikol. Hasil pengujian model disajikan pada tabel 3. Dibawah ini:

Tabel 3. *Goodness Of Fit*

	Koef	P Value
APC	0.460	<0.001
ARS	0.212	<0.001
AFVIF	1.269	<= 5

Sumber : data primer diolah, 2021

Pembahasan

Kompetensi Perangkat Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian yaitu kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini sesuai dengan teori stewardship dapat berimplikasi untuk menggambarkan keberadaan pemerintahan desa sebagai organisasi sektor publik yang andal, menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik, dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada mereka. Sehingga tujuan organisasi untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Good governance dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja yang baik atau tidak (Mahsun, 2010). Pemerintah desa telah menjalankan tugasnya dalam membuat kewajiban keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, reliable, understandable dan comparable).

Hal ini sesuai dengan teori stewardship dapat berimplikasi untuk menggambarkan keberadaan pemerintahan desa sebagai organisasi sektor publik yang andal, menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik, dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada mereka. Sehingga tujuan organisasi untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Good governance dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja yang baik atau tidak (Mahsun, 2010). Pemerintah desa telah menjalankan tugasnya dalam membuat kewajiban keuangan

dalam bentuk laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, reliable, understandable dan comparable).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dian Astri Budiana dkk, 2019 menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, selain itu, hasil penelitian dari Intan Trirosa Damayanti, 2020 menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan atas dasar hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Saran yang diajukan bagi peneliti selanjutnya adalah memahami aturan pelaksana atas regulasi pemerintahan desa, keuangan desa dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk memperkaya indikator variabel penelitian. Peneliti selanjutnya juga dapat meninjau kembali faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti budaya organisasi, komitmen aparat pemerintah dll.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muria Kudus yang telah memberikan dukungan material dan non material sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian. Penelitian ini merupakan luaran penelitian dengan skim pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- A Arens, A., J Elder, R., & S Beasley, M. (2016). *Audit dan Pelayanan Verifikasi*. In Jakarta : Erlangga
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*.Vol. 6 No. 2 Juli 2019.
- Damayanti. (2020). *Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi.Universitas Muria Kudus
- Ghozali, I. Latan, H. (2012). *Partial Least Square : Konsep, Teknik, dan Aplikasi Smart PLS 2.0 M3*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hidayah dan Wijayanti. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. *Jurnal AKSI*. Vol.2 Edisi 1 September 2017

- Kementerian Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Widodo, (2001). Implementasi Kebijakan. Bandung, CV Pustaka Belajar.
- Hariandja, MARIHAT TUA EFENDI, (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia, Grasindo. Jakarta.
- Wahyuddin. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *e Jurnal Katalogis*, volume 4 Nomor 5, Mei 2016
- Nazaruddin, A. (2019, Maret 28). Cukup bagus, pengelolaan Dana Desa di Kudus. antaranews. diakses dari <https://jateng.antaranews.com/berita/226645/cukup-bagus-pengelolaan-dana-desa-di-kudus>.
- Begini Penjelasan Dirjen Bina Pemdes terkait Permendagri No 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses dari <https://www.desapedia.id/begini-penjelasan-dirjen-bina-pemdes-terkait-permendagri-no-20-2018-tentang-pengelolaan-keuangan-desa/>
- Bimtek Sosialisasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses dari <https://pusdiklatpemendagri.co.id/bimtek-sosialisasi-permendagri-nomor-20-tahun-2018/>